

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah dijelaskan sebagai berikut :

1. Thesa Refgia (2016)

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *transfer pricing*. Menguji apakah pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus dan *tunneling incentive* tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada penggunaan variabel dependen yaitu *transfer pricing*, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak dan mekanisme bonus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

2. **Gusti Ayu Rai *et al* (2017)**

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *transfer pricing*. Menguji apakah pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, dan variabel mekanisme bonus

signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive* tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak dan mekanisme bonus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu menggunakan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

3. Dwi Noviaastika *et al* (2016)

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *transfer pricing*. Menguji apakah pajak, mekanisme bonus, dan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, dan *tunneling incentive* signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel *good corporate governance* (GCG) tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu menggunakan pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* (GCG) sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

4. Mispiyanti (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan model regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak dan

mekanisme bonus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu menggunakan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

5. Clara Xioling *et al* (2015)

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor penentu dan konsekuensi otonomi *transfer pricing*. Menguji apakah standardisasi antara produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja perusahaan berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah standardisasi antara produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja perusahaan sebagai variabel independen. Desentralisasi, ukuran divisi, transaksi internal dan kepemilikan Negara sebagai variabel kontrol sedangkan otonomi *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industri atau komersial di China. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan asimetri informasi antara manajemen puncak dan manajer divisi sebagai standardisasi antara produk, investasi asing dan perbedaan tarif pajak. Kedua, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan keselarasan tujuan seperti tingkat ukuran kinerja perusahaan di manajer divisi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada penggunaan variabel dependen yaitu *transfer pricing*, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel penelitian terdahulu menggunakan manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industri atau komersial di China, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan standardisasi antara produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja perusahaan sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

6. Novi Lailiyul Wafiroh *et al* (2015)

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *transfer pricing*. Menguji apakah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing

signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus dan *tunneling incentive* tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak dan mekanisme bonus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu menggunakan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

7. Pradeep Gupta (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak suatu perusahaan dan tarif produk terhadap *transfer pricing* dari perusahaan multinasional (MNC) di India. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif pajak dan tarif produk sebagai variabel independen sedangkan keputusan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri yang melakukan impor ke India selama periode 2001-2008. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *generalized least square* (GLS). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak dan tarif produk memberikan kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* dalam memaksimalkan

keuntungan yang diperoleh dari operasi di seluruh dunia dan mengurangi kewajiban pembayaran pajak perusahaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu menggunakan pajak, dan tarif produk, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

8. **Winda Hartati *et al* (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak dan mekanisme bonus sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana sama-sama menggunakan variabel pajak dan mekanisme bonus. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan pajak dan mekanisme bonus sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

9. Grant Richardson *et al* (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, aset tidak berwujud, dan *multinationality* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan publik terdaftar di Australia tahun 2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, aset tidak berwujud, dan *multinationality* sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik terdaftar di Australia tahun 2009. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa profitabilitas, *leverage*, aset tidak berwujud, dan *multinationality* berhubungan positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan hasil dari regresi tambahan menunjukkan *transfer pricing* meningkat melalui aset tidak berwujud dan *multinationality*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana sama-sama menggunakan variabel independen

leverage dan variabel dependen *transfer pricing*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan publik terdaftar di Australia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, *leverage*, asset tidak berwujud, dan *multinationality* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

10. Nazer Izadinia *et al* (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *size, leverage, Industry And Ownership structure* terhadap *tax rate* perusahaan yang berdampak pada utang pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *size, leverage, Industry And Ownership structure* sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* tahun 2009-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *Multiple Regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa *Size, Leverage, Industry And Ownership structure* memiliki pengaruh terhadap *tax rate* perusahaan yang berdampak pada utang pajaknya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana sama-sama menggunakan variabel *leverage*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan *size*, *leverage*, *Industry And Ownership structure* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pajak, mekanisme bonus, dan *leverage*.

Berikut hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen									
				PJ	MB	L	TI	TP	P	IA	M	UP	SK
1.	Thesa Refgia	2017	Transfer Pricing	S	TS		S						
2.	Gusti Ayu Rai <i>et al</i>	2017		S	TS		S						
3.	Dwi Noviasitika <i>et al</i>	2016		S			S						
4.	Mispiyanti	2015		TS	TS		S						
5.	Clara Xioling <i>et al</i>	2015		S								S	
6.	Novi Lailiyul Wafiroh <i>et al</i>	2015		S	TS		S						
7.	Pradeep Gupta	2014		S				S					
8.	Winda Hartati <i>et al</i>	2014		S	S								
9.	Grant Richardson <i>et al</i>	2013				S			S	S	S		
10.	Nazer Izadinia <i>et al</i>	2013				S						S	S

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

PJ : Pajak

MB : Mekanisme Bonus

L : *Leverage*

TI : *Tunneling Incentive*

TP : Tarif Produk

P : *Profitabilitas*

IA : *Intangible Assets*

M : *Multinationally*

UP : Ukuran Perusahaan

SK : Struktur Kepemilikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) sebagai pencetus teori agensi yaitu teori yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan dalam suatu perusahaan. Prinsip utama pada teori keagenan (*Agency Theory*) menyatakan bahwa adanya hubungan kerjasama dalam bentuk kontak kerja sama antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer untuk mendelegasikan suatu pengambilan keputusan dalam aktivitas perusahaan (Lindrianasari dan Luciana, 2010: 15-16). Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (prinsipal) mempekerjakan orang atau pihak lain (agensi) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang tersebut untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib

mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, stakeholders, pemegang saham, dan kreditor. Hubungan tersebut dapat terwujud ketika antara satu pihak atau lebih *principal* terdapat perjanjian atau kontrak dimana *principal* member perintah kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan *principal* dengan memberikan wewenang tersebut kepada agen untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Noviastika, 2016). Penyerahan kewenangan dari *principal* kepada agen menimbulkan masalah informasi asimetris antara *principal* sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah konflik antara pemegang saham dan manajer. Masalah keagenan (*agency problems*) muncul antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan.

Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1990) dalam bentuk "*oportunistik*" yang sering diinterpretasikan, yaitu :

- 1) Hipotesis rencana bonus (*Plan Bonus Hypothesis*), dalam *ceteris paribus* para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan

earning untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan *income smoothing*. Dengan hipotesis tersebut apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode *accrual*.

- 2) Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Convenat Hypothesis*), dalam *ceteris paribus* manajer perusahaan yang mempunyai ratio *leverage* (*debt/equity*) yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai *leverage ratio* yang kecil, sehingga menurunkan kemungkinan *default technic*. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham dan sebagainya. Selama masa perjanjian, jika perjanjian tersebut dilanggar perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam deviden atau pinjaman tambahan.
- 3) Hipotesis biaya proses politik (*Politic Process Hypothesis*), dalam *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan *earning* periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam

hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil.

Agency Theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi dimana terdapat konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dengan pemilik dan kreditur selaku *principal*. Asimetri informasi maupun konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat mendorong timbulnya penyajian informasi yang sebenarnya dari agen kepada prinsipal, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja pengelola perusahaan sebagai agen. Manajemen wajib memberikan informasi yang terkait dengan investasi dalam suatu perusahaan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada *principal*. Agen yang diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Lingga, 2012). Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

Teori akuntansi positif juga dapat dijadikan acuan yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajer. *Plan Bonus Hypothesis* sesuai dengan faktor mekanisme bonus dalam penelitian ini maka

manajer cenderung memaksimalkan laba bersih perusahaan demi memaksimalkan bonus atau remunerasi yang diterima. Bonus yang diterima manajer tersebut didasarkan atas pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka logis bila manajer melaporkan laba bersih setinggi mungkin (Saraswati dan Sujana, 2017). Adapun *Debt Convenat Hypothesis* sesuai dengan faktor *leverage* yang menunjukkan rasio hutang perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi dan salah satu caranya dengan praktik *transfer pricing*.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2017 paragraf 9, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Transaksi antar pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikaitkan dengan *transfer pricing* yaitu pada dasarnya keputusan *transfer pricing* dapat terjadi antar perusahaan atau antar divisi yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi akan sering melakukan transaksi dimana dapat memberikan banyak peluang untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan permasalahan keagenan. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan perusahaan sehingga *principal* hanya memiliki akses informasi yang kurang lengkap dan terbatas. Kewenangan dalam mengelola aset perusahaan yang diberikan oleh *principal*

kepada agen dapat membuat agen menyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan agar memperoleh keuntungan yang besar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat meminimalkan permasalahan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen.

2.2.2 Pajak

1. Definisi

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014 : 3), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgeter* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014 : 11), terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014 : 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan, yang terdiri dari :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut Sifat, yang terdiri dari :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, yang terdiri dari :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, dan lain-lain.

5. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*/ETR)

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku (Resmi, 2014:14). Jenis tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). *Effective Tax Rate* adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* sering dipergunakan sebagai landasan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Saraswati dan Sujana, 2017). *Effective Tax Rate* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *Effective Tax Rate* dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective Tax Rate* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Noviastika, 2016).

2.2.3 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Refgia, 2017). Mekanisme bonus berdasarkan laba

merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer (Saraswati dan Sujana, 2017). Berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Sebagaimana dalam (Hartati *et al*, 2014) mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer dip perusahaan dapat melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal (Mispiyanti, 2015). Para direksi dalam menjalankan tugasnya cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Hartati *et al*, 2014).

Mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar (Wafiroh dan Hapsari, 2015). Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan

pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor (Wafiroh dan Hapsari, 2015).

2.2.4 Leverage

Menurut Kasmir (2012) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Pembiayaan dengan hutang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Sedangkan Atika (2013) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung perusahaan. Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian.

Semakin besar hutang maka akan berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), maka hak pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang. Bahkan pertimbangan pajak muncul untuk membuat hutang menjadi pembiayaan dalam pajak tinggi dan ekuitas dalam pajak rendah (Richardson *et al*, 2013).

Analisis rasio keuangan diperlukan untuk mencerminkan aspek-aspek tertentu, salah satu rasio keuangan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang yang disebut dengan rasio leverage. Menurut Husnan (2012: 25-28) terdapat beberapa rasio yang mungkin dinyatakan sebagai berikut :

1. Rasio Hutang

Rasio hutang mungkin dihitung berdasarkan atas hutang jangka panjang (termasuk kewajiban membayar sewa guna atau leasing), mungkin juga seluruh hutang. Rasionya mungkin dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang} + \text{Sewa}}{\text{Hutang Jangka Panjang} + \text{Sewa Guna} + \text{Modal Sendiri}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan total ekuitas.

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Times Interest Earned*

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (terkadang ditambah dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Operasi (+Penyusutan)}}{\text{Bunga}}$$

4. *Debt Service Coverage*

Kewajiban financial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna (*leasing*). Ada juga kewajiban dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. *Debt Service Coverage* (DSC) dirumuskan sebagai berikut :

$$DSC = \frac{(Laba\ Operasi + Penyusutan)}{bunga + sewa\ guna + \frac{angsuran\ pokok\ pinjaman}{(1-t)}}$$

Jenis rasio hutang (*leverage ratio*) dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang terhadap ekuitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Richardson *et al*, 2013).

2.2.5 Transfer Pricing

1. Definisi

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih *et al*, 2012). Menurut Setiawan (2017) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang atau jasa yang dilakukan dari satu divisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih *et al*, 2012). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divis dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-*

company transfer pricing merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2017, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Transaksi antar pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer. Penetapan *transfer pricing* atau harga transfer dapat berjalan efektif jika didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam kesuksesan organisasi baik pelanggan, karyawan, pemasok, dan lain-lain; (2) suasana baik yang mendukung dalam penetapan harga transfer yang adil; (3) produk yang akan ditransfer memiliki harga pasar di luar perusahaan; (4) adanya kebebasan dalam menentukan sumber perolehan barang ataupun jasa; (5) pihak-pihak yang berkepentingan memiliki informasi yang detail dalam pengambilan keputusan mengenai biaya dan pendapatan; (6) unit bisnis atau divisi memiliki proses negosiasi (Sumarman, 2013: 232).

2. Metode *Transfer Pricing* dan Penentuan Harga Transfer yang Wajar

Menurut Sumarsan (2013: 234-237) menyatakan bahwa penentuan *transfer pricing* atau harga transfer yang wajar dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut :

a. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar

Merupakan penentuan harga transfer yang paling wajar dan independen karena barang ataupun jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan pada harga pasar yang berlaku. Kelemahan pada metode ini adalah jika produk yang ditransfer antara unit bisnis dalam satu lingkup perusahaan tidak dijual dalam pasar maka, penentuan harga transfer disesuaikan dengan harga pokok produksi yang telah dikeluarkan oleh unit bisnis.

b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok

Merupakan penentuan harga transfer dimana terdapat biaya ditimbulkan oleh unit bisnis penjual dalam produksi barang ataupun jasa. Kelemahan pada metode ini adalah dapat menghasilkan keputusan yang buruk, pihak unit bisnis yang melakukan transfer cenderung menaikkan harga transfer dari harga pokok produksi produknya, dan lain-lain.

c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi

Merupakan penentuan harga transfer dimana terjadi kondisi tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar sehingga perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang bersangkutan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Kelemahan pada metode ini adalah harga transfer tidak mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi

sulit yang dapat menimbulkan *conflict of interest* antara kedua belah pihak yang terlibat.

Adapun dalam penelitian ini salah satu penentuan *transfer pricing* dengan melihat tarif pajak perusahaan pada setiap Negara. Perusahaan yang melakukan penjualan pada perusahaan berelasi yang memiliki tarif pajak perusahaan lebih rendah dari Indonesia diindikasikan melakukan *transfer pricing* (Mispiyanti, 2015). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa Pada dasarnya tarif PPh Badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Tarif ini berlaku pada tahun 2009 kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif PPh Badan sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. Tarif ini diterapkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Adapun Tarif pajak di Negara yang lebih rendah dari Indonesia dapat diperoleh dari website *Trading Economics*. *Trading Economics* memberikan informasi yang akurat untuk 196 Negara termasuk data historis lebih dari 20 juta indikator ekonomi, nilai tukar, indeks pasar saham, imbal hasil obligasi pemerintah dan harga komoditas. Daftar tarif pajak perusahaan yang berada dibawah Negara Indonesia terlampir (lihat lampiran 1).

2.2.6 Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Negara tersebut. Praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut, sehingga perusahaan multinasional yang melakukan transaksi antar Negara atau perdagangan

internasional akan berusaha mencari jalan untuk menghindari pembayaran pajak yang terlalu tinggi dan terutama ketika melakukan operasi perdagangannya di negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Noviastika *et al*, 2016). Perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di beberapa negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan terdorong untuk melakukan praktek *transfer pricing*. Aparatur perpajakan atau otoritas fiskal selalu menginginkan transaksi hubungan istimewa tetap berdasar pada prinsip kewajaran dan bersifat *arm's length*, namun pada kenyataannya keputusan *transfer pricing* dilakukan untuk memindahkan pendapatan dan profit perusahaan ke luar negeri dengan berbagai macam cara, sanggahan, dan justifikasi atas manipulasi transaksi tersebut (Mispiyanti, 2015). Hal tersebut dilakukan dengan cara menggeser kewajiban pajak perusahaan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang ada di negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah yaitu dengan memperkecil harga jual sehingga laba yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangannya akan terlihat rendah (Noviastika *et al*, 2016). Hal itu secara tidak langsung akan memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional kepada negara.

Hartati *et al* (2014) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin besar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gupta (2014), Wafiroh dan Hapsari (2015), Xioling (2015), Noviastika (2016), Saraswati dan Sujana (2017), dan Refgia (2017) menyatakan hasil yang sama yaitu bahwa pajak berpengaruh

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Marfuah dan Azizah (2014) mengungkapkan bahwa perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

2.2.7 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan Refgia (2017). Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus Wafiroh dan Hapsari (2015). Para direksi dalam menjalankan tugasnya akan cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan Hartati *et al* (2014). Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antar perusahaan satu grup

dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar, hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut Refgia (2017). Transaksi perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa akan memiliki akibat ketika transaksi pihak terkait tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan, maka para direksi akan berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya terlihat baik dalam artian melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Akibat dari transaksi ini, maka akan ada salah satu subunit perusahaan yang akan dirugikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus yang mereka terima.

Hartati *et al* (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaanya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Untuk itu, para direksi tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik *Transfer Pricing*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017), Saraswati dan Sujana (2017), Mispiyanti (2015),

dan Wafiroh dan Hapsari (2015) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

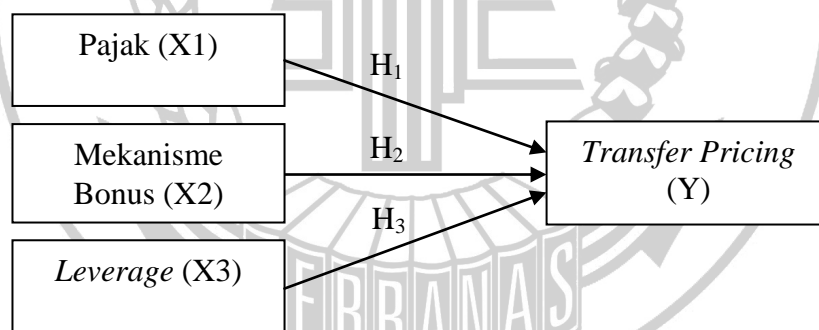
2.2.8 Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hutang merupakan salah satu tindakan perusahaan dalam memenuhi sumber pendanaan yang bertujuan untuk menjalankan bisnisnya. Richardson *et al* (2013) menyatakan bahwa semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan hutang perusahaan. Selain itu, semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing* (Atika *et al*, 2013). Dalam *debt covenant hypothesis* semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan

perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Richardson *et al* (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Izadinia dan Foroghi (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut sejalan dengan *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 **Hipotesis Penelitian**

Rerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan rerangka penelitian tersebut, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H₁ : Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*
- H₂ : Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*
- H₃ : *Leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

